

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Menyerahkan LHP Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahun 2021 kepada Pemerintah Provinsi Kalteng

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada Semester II Tahun Anggaran 2021 BPK Perwakilan Kalimantan Tengah telah melakukan pemeriksaan kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Kalteng dan instansi terkait lainnya. Pemeriksaan kinerja ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi COVID-19, Pemerintah melaksanakan vaksinasi COVID-19.

Pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Kalteng dan instansi terkait lainnya kepada Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. LHP diserahkan oleh Kepala Subauditorat Kalteng II, Mochammad Suharyanto mewakili Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan capaian dalam upaya pelaksanaan vaksinasi COVID-19 antara lain:

1. Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah memadai dalam mengalokasikan vaksin COVID-19, logistik, dan sarana prasarana;
2. Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah memadai dalam melakukan pendataan sasaran vaksinasi;
3. Capaian target vaksinasi COVID-19 di Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Oktober 2021 adalah sebanyak 998.163 untuk dosis I dan 576.567 untuk dosis II.

Tanpa mengurangi apresiasi terhadap upaya-upaya positif yang telah dilakukan sebagaimana diuraikan di atas, BPK menyimpulkan bahwa efektivitas upaya pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan dipengaruhi oleh permasalahan yang perlu untuk segera diperbaiki, yaitu:

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum sepenuhnya menyusun dan menetapkan target capaian vaksinasi atas alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan telah memiliki strategi untuk mencapai target tersebut;
2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum sepenuhnya mendistribusikan vaksin dan logistik dengan variabel yang valid; dan
3. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan pelayanan vaksinasi sesuai dengan prinsip dan standar pelayanan vaksinasi COVID-19.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa efektivitas atas upaya pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dipengaruhi oleh permasalahan signifikan yang perlu untuk segera diperbaiki. Apabila tidak segera diatasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maka permasalahan-permasalahan tersebut dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan layanan vaksinasi COVID-19.

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Telp: (0536) 3241118

Email: palangkaraya@bpk.go.id

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



BPK merekomendasikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah agar:

1. Menetapkan menetapkan target capaian vaksinasi mengacu pada alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat Secara rutin memutakhirkan kondisi dan jumlah logistik COVID-19 dalam penyimpanan/pendistribusian;
2. Melaksanakan pelayanan vaksinasi sesuai prinsip dan standar pelayanan vaksinasi; dan
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan vaksinasi secara rutin berkelanjutan.

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Telp: (0536) 3241118

Email: palangkaraya@bpk.go.id